

**ANALISIS KOORDINASI KERJA ANTARA DESA DENGAN KECAMATAN DAN KABUPATEN :
STUDI DI SUNGAI KAKAP, KABUPATEN KUBU RAYA**

Makrina Ciptayuni

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura

Email: cucieci@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari masalah mengenai hasil penyelenggaraan pemerintahan di bidang koordinasi melalui organisasi pemerintahan di Kantor Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif Karena dalam penelitian deskriptif kualitatif mencoba menyajikan informasi yang terkumpul secara verbal dalam bentuk yang detail bukan dalam bentuk angka atau formula. Karena tujuan dari metode ini untuk menginterpretasikan perilaku manusia yang bermakna baik tentang diri mereka sendiri atau orang lain. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Koordinasi Pemerintah Desa Jeruju Besar di Kecamatan Sungai Kabupaten Kubu Raya. Maka hasil dari penelitian ini Agar tercapai efisiensi, efektifitas dan produktivitas pembangunan, perlu dilakukan suatu studi atau kajian tentang pentingnya koordinasi antar instansi terkait dalam melaksanakan tugas pembangunan daerah. Koordinasi di dalam pelaksanaannya merupakan suatu proses untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik di antara kegiatan-kegiatan fisik maupun non-fisik.

Kata Kunci: Pembagian Kerja, Kerjasama Diantara Aparatur, koordinasi Ke Atas

Abstrack

This study departs from the results of governance issues in the field of coordination through the organization of government in the Office of the Great Village River District weeds Snapper Kubu Raya district. This type of research used in this study is descriptive qualitative descriptive qualitative research because in trying to present the information gathered verbally in the form of the detail is not in the form of numbers or formulas. Since the purpose of this method to interpret human behavior is significantly better about themselves or others. The purpose of this study to know the Village Government Coordination weeds in the Great River District Kubu Raya district. So the results of this study In order to achieve efficiency, effectiveness and productivity of development, needs to be a feasibility study on the importance of coordination between relevant agencies in implementing regional development tasks. Coordination in the implementation is a process to develop and maintain a good relationship between physical activity and non-activity-physical.

Keywords: Division of Labour, Cooperation Among Apparatus, coordination to Top.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan perlu dilaksanakan terus menerus dan berkesinambungan dalam usaha manusia mempertahankan dan memperbaiki tarap hidup mereka kearah yang lebih maju, makmur dan sejahtera lahir batin. Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan yang berencana, yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (Nation Building).

Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mengandung makna adanya keselarasan dari berbagai aspek kehidupan dan kebutuhan bangsa Indonesia antara kemajuan lahiriah dan batiniah. Pelaksana pembangunan tersebut menuntut tanggung jawab seluruh bangsa dan pemerintah diharapkan dapat menggerakkan serta mengarahkan segala potensi yang ada agar dapat mensukseskan program pembangunan yang sedang dan akan berlangsung.

Didalam melaksanakan program pembangunan diperlukan penanganan secara terpadu dari instansi vertikal. Sehingga dapat memberikan hasil guna dan daya guna yang lebih baik dan dirasakan serta dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Dalam kaitan itulah perlu adanya peranan koordinasi antara instansi vertikal dan dinas yang ada di daerah terutama pada wilayah kecamatan yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan di daerah.

Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat disusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin. Dalam melaksanakan koordinasi Kepala Desa selaku penguasa tunggal yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Jeruju Besar masih terdapat hambatan yang antara lain masih terdapat aparatur petugas Kepala Desa yang belum sepenuhnya menanggapi himbauan koordinasi kepala wilayah/Kepala Desa, sehingga

kadang-kadang terjadi saling melempar tanggungjawab dan berjalan sendiri-sendiri.

Koordinasi dilaksanakan dalam rangka mencapai kesatuan gerak untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan tanggung jawab pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Desa Jeruju Besar terletak di tangan kepala wilayah/Kepala Desa sebagai wakil pemerintah daerah tersebut.

Desa Jeruju Besar yang merupakan salah satu dari desa yang berada langsung di bawah Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, karena sebagian besar kegiatan, baik pemerintahan, perdagangan maupun kegiatan masyarakat lainnya kebanyakan berada disitu. Kondisi tersebut perlu diperhitungkan secara matang oleh pimpinan wilayah tersebut.

Kepala Desa selaku pimpinan di Desa Jeruju Besar adalah wakil pemerintah daerah di desa tersebut diberi tugas dan kewajiban sebagai koordinator dari setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pentingnya jalannya proses pembangunan yakni melalui peran Kantor Desa untuk mengkoordinasikan program-program pembangunan dengan pihak Camat selaku Pimpinan dalam suatu Kecamatan yang memang diberikan tugas secara berjenjang untuk dapat membangun dan mengawasi suatu pembangunan di wilayah desa dan dibantu oleh peran kerja dari Kantor Desa dan para staf Kantor Desa..

Dalam melaksanakan tugas koordinasi Kantor Desa di atas masih terdapat kendala-kendala antara lain seperti ada anggapan dari masing-masing aparatur pemerintah desa, bahwa mereka hanya melaksanakan tugas dari dan tanggung jawab mereka sendiri. Masih belum sepenuhnya terjalin hubungan yang selaras antara aparatur dan Kantor Desa, khususnya di dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan masing-masing. Dan Belum tegasnya pelaksanaan ketentuan Undang-undang tentang koordinasi antar masing-masing wilayah di desa tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan terdahulu, maka fokus penelitian adalah untuk mengetahui Koordinasi Yang Dihasilkan Di Kantor Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

B. PENGERTIAN KOORDINASI

Koordinasi menurut Handyaningrat (1989:2), merupakan usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuan.

Mooney (dalam Sunarto 1998:141), mengemukakan koordinasi sebagai *"The orderly arrangement of group effort, to provide unity of action in the pursuit of common purpose."* Dengan demikian Mooney memandang bahwa koordinasi merupakan suatu pengaturan usaha sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan.

Menurut Handyaningrat (1985:89-90) koordinasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bahwa tanggungjawab koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi adalah merupakan tugas pimpinan. Koordinasi sering dicampur-adukkan dengan kata koperasi yang sebenarnya mempunyai arti yang berbeda. Sekalipun demikian pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka tidak melakukan kerjasama. Oleh karena itu, maka kerjasama merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi.
2. Adanya proses (continues process). Karena koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.
3. Pengaturan secara teratur usaha kelompok. Oleh karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah individu yang bekerjasama, di mana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas

pekerjaan merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi.

4. Konsep kesatuan tindakan. Hal ini adalah merupakan inti dari koordinasi. Kesatuan usaha, berarti bahwa harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil.

Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan dari usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok di mana mereka bekerja.

Dengan demikian koordinasi dimaksudkan tidak lain ialah supaya setiap tindakan yang akan diambil baik mulai dari perencanaan maupun pelaksanaan serta evaluasi dapat diciptakan kesatuan gerak dan tindakan yang selaras, serasi dan terpadu dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara baik, efisien dan efektif.

Umumnya organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa apabila Koordinasi terlaksana dengan baik maka didalam prosesnya maka akan secara otomatis Koordinasi Birokrasi juga baik dan pada akhirnya akan menjadi suatu serangkaian kegiatan pekerjaan menyusun, menghubungkan-hubungkan, menyelaraskan dan menyatupadukan orang-orang dalam pekerjaan dan kegiatan sehingga semua berjalan secara terpadu dan harmonis guna mencapai tujuan bersama.

Hasibuan (2007:87) mengungkapkan bahwa koordinasi memiliki 3 (tiga) sikap, yakni:

- 1) Koordinasi adalah dinamis bukan statis.
- 2) Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator (manajer) dalam rangka mencapai sasaran.
- 3) Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Menurut Sulistiyani (2003:223), kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Sedangkan menurut Bernardin dan Russel dalam Sulistiyani (2003:223-224) menyatakan

bahwa kinerja merupakan catatan *outcome* yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Kinerja (*performance*) sebagai kata benda (*noun*) mengandung arti "*thing done*" (sesuatu hasil yang telah dikerjakan). Kinerja merupakan suatu hasil kerja dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Prawirosentono, 1999:2).

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan demikian dalam penelitian ini tidak akan menghasilkan temuan melalui prosedur statistik atau pengukuran (Strauss dan Corbin, 1997:19). Karena dalam penelitian deskriptif kualitatif mencoba menyajikan informasi yang terkumpul secara verbal dalam bentuk yang detail bukan dalam bentuk angka atau formula. Karena tujuan dari metode ini untuk menginterpretasikan perilaku manusia yang bermakna baik tentang diri mereka sendiri atau orang lain.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Teknik observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung pada objek yang diteliti saat melakukan penelitian dengan masyarakat setempat yaitu Marzuki beserta 3 orang kelurahan yang terdiri dari staf,sekdes dan kades kantor desa jeruju besar.
2. Teknik Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan subjek penelitian (informan). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu dengan pewawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yaitu dengan masyarakat dan kades di kantor desa jeruju besar.
3. Teknik dokumentasi, yaitu suatu cara untuk mencari, mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen dan lapangan-lapangan

tertulis baik dari pemerinath maupun dari masyarakat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis serta mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan koordinasi kerja Kepala Desa dengan Para Kepala Urusan (Kaur) dan staf liannya dalam peyelenggaraan pemerintahan di Daerah Jeruju Besar Kabupaten Kubu Raya.

Teknik observasi dan wawancara tersebut digunakan dengan melakukan pengamatan secara langsung dengan masyarakat setempat dan kades di kantor desa jeruju besar tersebut. Sedangkan teknik dokumentasi dengan mengumoualkan dan mempelajari dokumen-dokumen dan lapangan-lapangan tertulis baik dari pemerintah maupun dari masyarakat yang terkait langsung dalam penelitian tersebut.

D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOORDINASI KANTOR DESA JERUJU BESAR DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

Penduduk di kecamatan adalah merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan, akan tetapi jika pertambahan jumlah penduduk yang tinggi juga akan menjadi masalah tersendiri yang perlu ditanggulangi. Kecamatan Sungai Kakap memiliki jumlah penduduk sebanyak 12.005 jiwa yang terdiri dari: Laki-laki sebanyak 8.073 jiwa dan Perempuan sebanyak 3.932 jiwa. Seperti halnya kecamatan lainnya yang berada di daerah Kalimantan Barat adalah umumnya sebagai petani. Demikian halnya dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Kakap yang pada umumnya adalah sebagai petani sawah dan ladang, di samping itu sebagai masyarakat desa mereka juga berusaha untuk menambah pendapatan dengan bekerja nelayan dan perkebunan.

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat, hal ini jelas terlihat dengan usaha-usaha maupun kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan

seseorang diharapkan menjadi suatu dasar yang kokoh bagi dirinya untuk melakukan sesuatu tindakan yang dapat menjadi tolak ukur dalam masyarakat.

Demikian juga halnya di dalam penelitian ini, bahwa salah satu faktor yang berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan kecamatan adalah masyarakat di kecamatan yang punya pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Sungai Kakap: Tidak tamat SD sebanyak 763 orang, Tamat SD sebanyak 346 orang, Tamat SMP sebanyak 126 orang, Tamat SMA sebanyak 62 orang, Tamat Akademik sebanyak 13 orang, Belum Sekolah sebanyak 695 orang dan total semua sebanyak 12.005 orang. Berdasarkan data yang terdapat di atas tentang pendidikan masyarakat Kecamatan Sungai Kakap terlihat dengan jelas bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengecap pendidikan sampai tamat SD yaitu sebanyak 763 orang (38,05 %). Dengan demikian secara umum dapat dikatakannya bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Sungai Kakap relatif masih rendah dan hal ini mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan.

Koordinasi pada suatu organisasi memerlukan adanya pembagian tugas antar semua aparat pemerintah yang ada dalam suatu organisasi. Betapapun besar kemampuan seseorang atau sekelompok orang didalam organisasi tidak memungkinkan dapat menyelesaikan semua masalah yang terjadi dengan sendirinya. Sehingga memerlukan andil dari mahluk sosial lainnya yang memiliki potensi dan kemampuan dalam pemecahan suatu masalah.

Koordinasi Pemerintahan Desa di Kantor Desa Jeruju Besar belum berjalan secara efektif dikarenakan beberapa faktor diantaranya kurangnya pengetahuan mengenai penggunaan alat-alat komunikasi yang tersedia dan fasilitas-fasilitas yang belum dimanfaatkan secara baik. Minimnya informasi dan pengetahuan menjadi faktor utama dalam pelaksanaan koordinasi di Kantor Desa Jeruju Besar.

Koordinasi yang diberikan oleh aparat pemerintah desa merupakan suatu pengaturan usaha sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan. Pengaturan usaha kelompok atau organisasi memang diperlukan, mengingat

organisasi terdiri atas sejumlah unit kerja yang berlainan fungsi namun diikat oleh satu kesatuan tujuan tertentu.

Sebagai salah satu usaha koordinasi yang dilakukan pada tingkat pemerintah desa melaksanakan penyelenggaraan rapat hal demikian dilakukan agar timbul rasa tanggungjawab dari para aparat pemerintah sehingga dapat menghasilkan suatu koordinasi yang baik demi pencapaian suatu keselarasan, keserasian dan keterpaduan dimulai dari suatu perencanaan hingga pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang tanggungjawab aparat pemerintah didalam perwujudan penyelenggaraan suatu koordinasi demi kepentingan umum dan demi suatu pencapaian yang menghasilkan suatu nilai guna dan daya guna yang bermanfaat bagi masyarakat.

1. Pembagian Kerja di Kantor Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembagian tugas dalam pekerjaan pemerintahan adalah peran penting Aparatur Negara dalam proses pelaksanaan tugas. Disisi lain pemahaman tentang tugas yang akan menjadi tanggungjawab dari seorang aparat juga menjadi faktor yang menentukan dan mengikat peran Aparatur dan Tugas yang menjadi Tanggungjawabnya.

Apabila seorang aparat pemerintahan tidak memahami tugas yang dibebankan kepadanya maka hasil yang diperoleh tidak akan sesuai dengan keinginan yang menjadi tujuan dari pencapaian organisasi. Setiap perintah dari pimpinan pada bawahan merupakan suatu perintah kerja yang harus dilaksanakan namun apabila dalam pemberian perintah tidak disosialisasikan terlebih dahulu maka tidak akan menemukan kejelasan dalam suatu perintah baik itu melalui cara pemberian tugas secara tertulis maupun secara lisan. Maksudnya didalam pemberian tugas memerlukan penjelasan sehingga bawahan dapat melaksanakan tugasnya secara terarah. Bentuk dari kinerja kerja dari aparat pemdes yang diharapkan dapat tercapai akan sesuai dengan tujuan hasil kerja memerlukan pemahaman yang mendasar dari

aparatur pemerintah sebagai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pimpinan dalam hal ini dipimpin oleh Kepala Desa. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa (Desa Jeruju Besar)

“Saya juga sebenarnya tidak tahumenuh tentang perilaku staf saya, karena selama ini saya perhatikan mereka sudah melakukan tugas dan tanggungjawab dengan baik dalam lingkungan kerja. Jika ada masalah demikian semestinya pihak yang sudah melihat adanya terjadi penyimpangan-penyimpangan pada staf saya, dikala mereka bertugas, cepat laporkan dengan saya. Tentunya dengan bukti yang akurat pula, sehingga tidak terjadi suatu kesalah pahaman dikemudian hari.”

Demikian juga yang diungkapkan melalui hasil wawancara bersama oleh Marzuki (Masyarakat Dusun Karya Utama Desa Jeruju Besar) bahwa :

“Benar sekali, dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah semestinya mereka dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, jangan mentang-mentang sebagai pejabat pemerintah bertindak semaunya. Seperti dalam hal jam kerja saja masih ada yang tidak disiplin, ini kan menjadi suatu penilaian yang negatif dimata masyarakat. Kami yang tidak sekolah saja mengerti akan arti disiplin, apalagi mereka selaku pejabat pemerintahan di lingkungan Desa Jeruju Besar.”

Keterangan seperti yang dipaparkan diatas menjelaskan bahwa tingkat pemahaman dan tanggungjawab aparatur pemdes masih kurang didalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pejabat publik. Dengan demikian dalam paparan di atas menyatakan bahwa aparatur pemerintah sebenarnya adalah pelaku dari pelayanan administrasi terutama dalam peran mereka untuk mewujudkan suatu perubahan yang baik di desa jeruju besar dalam hal pembangunan fisik maupun non fisik dengan pelaksanaan rapat koordinasi yang dilakukan dengan masyarakat berdasarkan azas musyawarah. Peran aparatur pemerintah semakin penting karena akan berhubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat baik itu pada aspek sosial, budaya maupun ekonomi dimana peran aparatur pemerintah desa tidak

hanya dalam hal menjalankan tugas dan kewajiban namun lebih pada peran serta mereka di dalam mengayomimasyarrakat guna mencapai suatu tujuan bersama dalam pembangunan.

Fasilitas kantor desa sebenarnya sudah memenuhi syarat dalam hal sarana dan prasarana komunikasi sehingga memudahkan dalam akses untuk saling berkoordinasi dengan instansi pemerintahan secara vertikal. Namun masih saja ada kendala dalam hal pelaksanaan tugas tersebut. Pasalnya tidak semua aparatur pemerinatah desa memahami bagaimana cara penggunaan fasilitas kantor. Seperti yang dipaparkan oleh Kepala Urusan Pemerintahan Desa Jeruju Besar yakni bahwa “Tidak semua aparatur pemerintah desa dan para anggota fungsional memahami cara penggunaan alat komunikasi seperti penggunaan pesawat radio, HT/radio CB, komputer dan laptop yang menggunakan jaringan frekuensi dan internet dalam mengaktifkan penggunaanya.

Tentunya hal seperti ini menjadi kendala dalam melaksanakan tugas di Kantor Desa Jeruju Besar. Semestinya dengan adanya fasilitas kantor yang lengkap seperti ini akan mempermudah terjalannya hubungan kerja dan kinerja kerja yang menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di desa jeruju besar. Namun hanya beberapa Kepala Urusan dan staf saja yang memahami penggunaan sarana ini. Padahal semua anggota sudah diberikan pelatihan dalam menggunakan fasilitas kantor ini.

Dasar dari sebuah organisasi adalah dengan adanya wujud dari bentuk koordinasi kerja. Hal ini merupakan tolak ukur yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Dapat dilihat bahwa pembagian kerja kepada para aparatur pemerintah desa Jeruju Besar sudah merata dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sehingga terbagi dengan merata dan sesuai dengan proporsi kerja masing-masing bidang.

2. Kerjasama diantara Aparatur Pemerintah Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya

Kurangnya kerjasama dalam suatu organisasi disebabkan karena setiap bagian atau golongan mementingkan bagiannya masing-

masing. Setiap kepala bagian atau unit bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dalam unitnya sendiri atau adanya departemention. Dengan adanya vested interest dalam unit-unit atau bagian sehingga mereka cenderung untuk memusatkan perhatian kepada tujuan bagiannya sendiri.

Dalam melaksanakan pekerjaannya aparatur pemerintah desa harus dapat berhubungan dan bekerjasama antara rekan sekerjanya. Menurut hasil wawancara bersama Kepala Urusan Umum mengungkapkan bahwa :

“Dalam melaksanakan kerjasama pada hubungan kerja di Kantor Desa Jeruju Besar adalah bagian dari kebersamaan. Kami saling membantu satu dan lainnya. Tentunya dengan tetap dengan memprioritaskan tugas pokok masing-masing bagian urusan terlebih dahulu sehingga tidak mengakibatkan terbengkalainya tugas pokok yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab personal. Kami saling membantu dalam pelaksanaan koordinasi, apabila saya bisa membantu sekretaris desa maka akan saya lakukan tetapi setelah saya menyelesaikan tugas saya terlebih dahulu. Dan demikian sebaliknya yang dilakukan rekan-rekan lainnya.”

Ditegaskan oleh Kepala Desa Jeruju Besar mengungkapkan bahwa *“Tidak jarang selaku Kepala Desa dan pimpinan dalam kantor, saya mengambil alih tugas Kepala Urusan rekan-rekan yang lainnya, apabila mereka masih menyelesaikan urusan atau sedang berhalangan hadir karena sakit atau dinas luar sedangkan sifatnya tugas ini mendesak atau penting. Apabila memang anggota tersebut sudah izin terlebih dahulu atas ketidakhadirannya di kantor.”*

Faktor-faktor kurangnya kedisiplinan aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah berasal dari individu itu sendiri dan dapat menjadi penghambat yang membutuhkan penanganan yang serius agar kegiatan koordinasi dapat berjalan dengan baik.

Bentuk dari terapan disiplin pegawai akan terlaksana dengan baik apabila diimbangi oleh kemampuan suatu organisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam koordinasi kerja. Untuk disiplin kerja di

Kantor Desa Jeruju Besar memang sudah maksimal, dalam suatu pencapaian hasil kerja juga sudah memuaskan. Memang untuk dilapangan terdapat kendala dalam pelaksanaan disiplin yakni pada Kepala Urusan Keamanan dan Ketertiban Desa Jeruju Besar. Namun masalah ini bukan dikarenakan oleh Human Error tetapi dikarenakan faktor alam. Tetapi sudah dapat diatasi dengan memberikan tempat tinggal berupa tinggal sementara selama bertugas di Kantor Desa Jeruju Besar.

3. Koordinasi ke atas (kecamatan dan kabupaten)

Koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu daya upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui kinerja Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan antara aparatur pemerintah desa sehingga hal tersebut dapat berjalan dengan serasi dan terpadu untuk mencapai hasil pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dalam upaya dan usaha yang dilakukan pada penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh aparatur pemerintah desa dilingkungan kerja, baik itu antara satu dengan lainnya, aparatur pemerintah desa dengan masyarakat serta atasan dengan bawahan dll berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Maka diperlukan menjalin hubungan kerjasama antar organisasi baik itu secara vertikal maupun horizontal, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam mengkoordinir kegiatan-kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, diperlukan kesatuan pandangan dalam mempedomani segala daya usaha yang akan dilaksanakan oleh masing-masing aparat pemerintah guna menunjang tujuan sehingga pelaksanaannya dapat terwujud dan menjadi lancar.

Untuk mengetahui bagaimana efektifitas pelaksanaan rapat dalam pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh aparat pemdes di Kantor Desa Jeruju Besar, peneliti telah mewawancarai beberapa aparatur pemerintah desa, aparatur kecamatan dan masyarakat yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Sikap yang begitu “Welcome” juga ditunjukkan oleh Camat Sungai Kakap pada saat

diwawancarai mengenai wujud dari Kesatuan dalam Penyelenggaraan Koordinasi di lingkungan jeruju besar, menurut hasil wawancara mengungkapkan bahwa *“Tentunya yang menjadi kesatuan didalam penyelenggaraan koordinasi yakni pertama-tama dengan menyatukan langkah yang seirama, serasi dan sejalan dalam penentuan misi dan tujuan koordinasi. Karena pada poin ini langkah awal yang memang harus ditegas sehingga dengan demikian memiliki pondasi yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Terkadang orang diluar organisasi memandang bahwa langkah ini tidak begitu berarti, namun apabila seseorang sudah mengenal terlebih dahulu apa itu bentuk dari organisasi maka secara lambat laun ia akan mengerti pula peran penting dari persamaan langkah dalam misi dan tujuan koordinasi. Dan pada akhirnya menghasilkan suatu kinerja kerja yang kemudian menopang segala kegiatan koordinasi yang akan dilaksanakan.”*

Terkait dengan apa yang disampaikan diatas maka peneliti menilai bahwa keberhasilan suatu penyelenggaraan koordinasi melalui rapat koordinasi musyawarah tidak dapat dilihat hanya dari satu sudut pandang saja. Namun secara akurat dan konstitusional, penulis ingin mengungkapkan bahwa didalam penyelenggaraan koordinasi tidak dapat terlepas dari peran suatu organisasi baik itu organisasi formal dan informal hal ini yang kemudian pada hasil akhir menghasilkan suatu kinerja kerja yang begitu besar manfaatnya bagi kelangsungan organisasi dan pelaksanaan koordinasi pemerintahan. Tentunya dengan keterkaitan berbagai pihak, baik itu pemerintah, aparatur pemerintahan dan masyarakat harus memiliki kesamaan langkah dalam menuju suatu pencapaian yang diharapkan. Kerjasama, keselarasan hubungan kerja, komunikasi, interaksi, dll perlu selalu menjadi faktor penunjang dalam pelaksanaan koordinasi pada lingkup pemerintahan.

Bentuk dari hasil Koordinasi Kerja Kepala Desa adalah berupa rapat kerja yang dilaksanakan oleh Kantor Desa Jeruju Besar guna mewujudkan penyelenggaraan koordinasi kerja. Berbagai bentuk partisipasi dari

masyarakat juga perlu direalisasikan, sehingga forum rapat ini merupakan wadah dari aspirasi masyarakat. Demi berjalannya program kerja yang berkesinambungan. Peningkatan efektifitas organisasi dalam pelaksanaan koordinasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Jeruju Besar bahwa *“Kami memang sudah melakukan yang terbaik dalam pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggungjawab berkenaan dengan pelaksanaan koordinasi, misalnya melalui rapat koordinasi dengan masyarakat berazaskan pada musyawarah di lingkungan desa jeruju besar terutama berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat mengayomi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya kami tidak hanya melakukan rapat sembarangan rapat. Didalam rapat ini kami juga memaparkan apa yang menjadi program kerja pemerintah dalam hal memberdayakan masyarakat desa didalam pembangunan desa jeruju besar. Sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya lagi tentang kejelasan program yang dirapatkan. Hal ini merupakan kewajiban pemerintah desa untuk menjelaskan dan memberikan pandangan tentang program yang dicanangkan pemerintahan guna memberdayakan masyarakat desa. Yang kami lakukan tidak semata-mata berdasarkan ‘suka hati’ namun ini demi masyarakat desa jeruju besar”*

Oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya didalam penyelenggaraan pemerintahan berkenaan dengan tugas pelaksanaan koordinasi, dengan pembagian tugas didalam sisten organisasi aparat pemdes menjalankan tugas yang masing-masing diemban dalam pelaksanaan koordinasi tersebut. Pada dasarnya yakni Kepala Desa selaku Kepala Wilayah dan Pimpinan di Kantor Desa Jeruju Besar mesti bersikap tegas dalam pemberian pembagian tugas kepada para aparat pemerintah desa dan dapat berlaku tegas pula kepada aparat desa yang tidak melaksanakan tugasnya dalam sistem organisasi.

Hal tersebut juga berkaitan dengan kemampuan dan kinerja pemimpin dimana dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam hal

mempertanggungjawabkan amanah negara demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan. Dilakukannya pembagain tugas yang tepat dan penyerahan wewenang kepada aparat pedes atas tugas masing-masing aparat maka dengan ini **aparat** pedes memiliki tanggungjawab untuk mempertanggungjawabkan amanat dalam bertugas, apabila tugas ini terlaksana dengan baik maupun terlaksanan dengan tidak baik. Sehingga pada hasil akhir dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, secara prima dan maksimal dalam proses pelaksanaan tugas. Kemudian pada hasil akhir dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat akan peran penting aparatur pemerintahan desa dalam proses berjalannya penyelenggaraan pemerintahan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil survey dan analisa bahwa masih banyak permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam upaya membangun dan menggali serta mengolah potensi-potensi yang masih banyak terdapat di Kantor Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Juga dalam upaya pembangunan yang adil, merata dan sejagtera. Dalam upayanya membangun dan mengolah potensi desa diperlukan peran serta perhatian yang serius dari pemerintah daerah kabupaten dan propinsi untuk menindak lanjuti temuan-temuan Kelompok Kuliah Kerja Mahasiswa sebagai masukan dan acuan dalam melaksanakan pembangunan. Semoga beberapa program kerja yang telah dipaparkan diatas dapat ditindak lanjuti dan menjadi masukan bagi kampus sebagai lembaga pendidikan yang turut serta menentukan perkembangan dan perubahan masyarakat, terutama bagi pemerintah daerah agar dijadikan acuan untuk melaksanakan pemerataan pembangunan dan menggali kembali potensi yang masih banyak belum terolah secara baik yang umum yang tersebar di desa untuk dijadikan aset da masukan pendapatan daerah yang akhirnya akan dikembelikan untuk masyarakat dalam bentuk pembangunan yang merata antara kota dan desa tanpa merubah tatanan social dan daerah yang sudah tertata secara baik.

Peranan Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat meliputi 3 hal yaitu pembinaan masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat dan pengembangan terhadap masyarakat. Ketiga variabel tersebut telah berjalan secara maksimal. Pembinaan terhadap masyarakat meliputi kegiatan keagamaan, kegiatan sosial budaya dan pelayanan kesehatan, Pelayanan masyarakat meliputi pelayanan di bidang pertanian, kesehatan dan perekonomian, sedangkan pengembangan masyarakat lebih banyak difokuskan pada pengembangan SDM melalui pembangunan infrastruktur baik formal maupun non formal, termasuk pula diantaranya pengembangan ekonomi kerakyatan. Faktor-faktor penghambat pengembangan organisasi pemerintahan Desa Sederhana yang dapat diidentifikasi meliputi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal terdiri dari aspek sumber daya manusia atau aparat pelaksana yang masih kurang baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang belum memadai, rendahnya kualitas SDM aparat pemerintah desa yang rata-rata hanya tamat sampai tingkat SMA, faktor pendanaan yang tersedia bagi organisasi bersangkutan yang masih minim untuk dapat digunakan dalam pengelolaan organisasi serta sikap kepala desa yang terkesan lebih mementingkan orang lain bila terdapat proyek untuk pembangunan desa, Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah partisipasi masyarakat dalam mentaati aturan Desa Hubungan antar status. Secara umum dapat dikatakan bahwa status bergantung pada seberapa besar seseorang memberikan sumbangannya bagi terciptanya tujuan seseorang yang memberikan jasa terbesar cenderung berusaha mendapatkan status yang tinggi. Sebaliknya seseorang yang memberikan jasa yang tidak begitu besar biasanya bersedia menerima status yang lebih rendah. Upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kepala Desa terhadap pengembangan organisasi pemerintahan Desa Sederhana dari hasil temuan penelitian dapat direkomendasi saran untuk peningkatannya sebagai berikut: Masih perlu dilakukan sosialisasi oleh aparat pemerintah Desa mengenai pentingnya pengembangan organisasi terutama bagi masyarakat yang berdomisili di Desa tersebut, Peranan Kepala Desa terhadap pemberdayaan masyarakat pemerintah Desa Sederhana Kecamatan Khusus Kabupaten Umum

hendaknya dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan dan perlu dilakukan pengawasan yang secara rutin terutama terhadap kegiatan masyarakat yang menunjukkan adanya kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut adalah Vertikal yaitu : Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Kota Bangun dinilai baik artinya koordinasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Melaporkan segala kebijakan yang diputuskan pemerintah di Kecamatan Kota Bangun pada umumnya sudah berjalan dengan baik, adapun unsur yang terkandung didalam upaya koordinasi tersebut meliputi pelaksanaan tugas camat, penyampaian program kepada instansi-instansi dan pembagian tugas oleh camat. Menyampaikan secara berkala laporan tertulis kepada pimpinan atau kepala wilayah (camat), dinilai baik karena berhasilnya pelaksanaan koordinasi yang tidak lepas dari dukungan aparat kecamatan, instansi vertikal maupun horizontal dan cabang dinas serta komponen masyarakat Kecamatan Kota Bangun. Mensosialisasikan tujuan kepada para anggota, camat selaku penanggungjawab pemerintah kecamatan telah melakukan sebagai mana mestinya, tetapi ada juga pensosialisasian dilakukan dengan cara memberikan pengumuman melalui surat edaran maupun melalui pengeras suara pada hari jumat, hal itu bertujuan agar seluruh masyarakat yang hadir bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lainnya. Atasan atau pimpinan harus sering melakukan komunikasi informasi dengan para bawahan, yang dilakukan oleh camat kota bangun terhadap pegawainya, kalau dilihat sudah cukup baik, karena camat selalu berkomunikasi dengan baik terhadap pegawainya. Horisontal Optimalisasi Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan (Mirwan) Rapat koordinasi antara lembaga, yang ada di Kecamatan Kota Bangun dilakukan oleh para unsur muspika, yaitu Camat, Danramil, PT. Muzilienz dan Kepolisian Kecamatan Kota Bangun. Konsultasi antara kepala instansi atau lembaga, pelaksanaan koordinasi yang berbentuk konsultasi antara camat dan instansi terkait telah berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan dalam pelaksanaannya. Mensosialisasikan tujuan kegiatan dan proyek, bahwa tidak semua proyek yang di

sosialisasikan oleh instansi-instansi yang ada dikecamatan KotaBangun, hal itu di karenakan keterbatasan waktu yang tidak mendukung untuk di sosialisasikan. Melakukan pemantauan dan pengawasana secara bersama, dapat diketahui bahwa tidak semua instansi-instansi yang terlibat di dalam pemantauan dan pengawasan kegiatan proyek–proyek yang ada di kecamatan kota bangun, kecuali diminta oleh camat untuk turun bersama–sama kelapangan dan melihat langsung kegiatan proyek. Antara lembaga saling memberikan informasi, dapat di ketahui bahwa didalam menyampaikan informasi instansi–instansi yang terkait belum sepenuhnya di lakukan oleh pihak kecamatan, hal itu disebabkan masih terjadi perumusan tugas, wewenang dan tanggungjawab antar unit kerja yang ada di kecamatan kota bangun. Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut : Koordinasi di wilayah Kecamatan Kota Bangun antara Camat dengan kepala instansi vertikal serta cabang dinas hendaknya dioptimalkan lagi, melalui pelaksanaan rapat koordianasi secara rutin dan hubungan kerja yang harmonis. Camat mengawasi koordinasi pegawai dikantor terhadap staf, hendaklah meningkatkan teknik kematangan administrasi, teknis oprasional dan menghimbau para Instansi untuk lebih memahami kemampuan melalui koordinasi. Camat dalam melakukan koordinasi lebih mengutamakan komunikasi yang bersifat timbal balik untuk menciptakan kesatuan bahasa dan kerja sama sehingga koordinasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam melakukan suatu permasalahan baik sebelum atau sesudah koordinasi yang berkaitan dengan instansi internal maka instansi tersebut. harus melaksanakan koordinasi terlebih dahulu dengan instansi eksternal. Pemberitahuan tentang rapat koordinasi sebelumnya diberitahukan beberapa hari sebelum dilaksanakan rapat koordinasi

Makrina Ciptayuni

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

REFERENSI

- Handayani, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Manajemen*, (Jakarta : CV. Haki Masagung, 1990).
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya offset, 2006).
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. *Analisis Kebijakan*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2007).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2011).
- Dwiyanto, Agus dkk. *Teladan dan Pantangan: Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gajah Mada, 2003b).

